**Kepentingan Indonesia dalam Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) tahun 2014**

**Nadia Kusrini1**

***Abstract :*** *This study aims to explain the Indonesia's consideration in implementing foreign account tax compliance act (FATCA)in 2014. The research method used in this study is eksplanatif, with data sources obtained from books, journals, websites and other reliable data sources. In this study, the author uses the theory of International Regimes.The results of this study indicate that Indonesia's interests in the application of FATCA are factors that the Indonesian government considers in making the decision to follow FATCA 2014. And influenced by variables such as Political Power where political power also shapes Indonesia's interests to follow FATCA, Norms & Principles, namely there are rights and obligations that encourage Indonesia to follow FATCA, and Habit & Custom where tax abuse is a common problem that creates international cooperation through FATCA.*

***Keywords****: Keywords: FATCA, Indonesia, Interests, Implementation*

# Pendahuluan

Globalisasi ekonomi merupakan upaya untuk mempermudah kerjasama dalam bidang ekonomi dengan cara menghilangkan sejumlah hambatan terhadap perdagangan yang dilakukan perusahaan, salah satunya dalam investasi keuangan. Hal ini menjadi batu loncatan untuk menciptakan peluang peluang baru bagi negara maju maupun negara berkembang. Namun nyatanya dengan berbagai kemudahan dalam transaksi keuangan, meningkat pula aktivitas illegal seperti penggelapan dan penhindaran dana pajak.

Untuk menanggulangi permasalah pajak. Pada tanggal 18 Maret 2010, Amerika Serikat membuat undang-undang perpajakan dengan nama *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan institusi keuangan (FI) maupun yang bukan bagian dari institusi keuangan (NFFE) untuk melakukan perjanjian dengan *Internal Revenue Service* (IRS). Dengan ancaman 30% *withholding tax* atau denda 30% untuk semua penghasilan yang berasal dari AS.

Pada tahun 2012, FATCA disetujui dengan 5 mitra dagang utama AS yaitu Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia mengikuti FATCA dengan status *Agreement in Subtence* dan menggunakan IGA-1 karena dianggap lebih mudah dan serasi dengan sistem pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, Indonesia masih mengkoordinasi beberapa masalah dalam penerapan FATCA. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk memenuhi pelaporan keuangan terhadap AS, seperti membuat dan mengoperasikan sistem kepatuhan ( mengganti undang undang tentang kerahasiaan bank ). Adapun masalah lain, seperti masalah operasional dan

1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : [nadiakusrini70@gmail.com](mailto:nadiakusrini70@gmail.com)

bisnis. Kondisi ini masih ditambah dengan kebutuhan personil ahli serta anggaran yang cukup untuk membuat sistem pertukaran informasi.

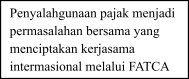
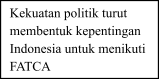
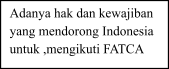
# Kerangka Dasar Teori

***International Regimes***

Stephen D. Krasner mendefinisikan Rezim Internasional sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan di mana ekspektasi-ekspektasi aktor bertemu dalam suatu area isu yang diberikan. (Yanuar, 2017)

Pembentukan rezim internasional menurut Krasner berdasarkan adanya variabel kausal dasar yang menyebabkan terbentuknya rezim. Variabel kausal dasar ini terdiri dari *egoistic self-interest, political power, norms and principles, Habit and custom,* dan *knowledge*. (Wibisono, 2017) Untuk penerapan FATCA di Indonesia, variabel yang digunakan adalah *Political Power, Norms and Principles* dan *habit and Custom.* Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut:

# Model Kerangka Berpikir



Rezim dibentuk dengan tujuan membuat interaksi internasional yang mengatur aktivitas para aktor agar tidak keluar batas dan lebih efektif dalam menjalin kerjasama. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah negara negara yang memiliki kekuatan dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang militer*.* Dimana negara berkembang menjadi sebuah sarana untuk mencapai stabilitas politik, bukan hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional.

Terkait kepentingan Indonesia di FATCA, variabel *Political Power, Norms & Principles,* dan *Habit & Custom* menunjukan bahwa kekuatan politik bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan suatu negara dalam hal ini yang paling berperan adalah AS. Sistem denda yang dibuat AS turut membentuk kepentingan Indonesia berupa hak dan kewajiban untuk mengikuti FATCA. Hal ini juga didorong oleh permasalahan yang sama berupa penyalahgunaan pajak. untuk itu guna mencapai harapan bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan pajak maka terciptalah kerjasama internasional, dalam hal ini adalah FATCA.

Pendekatan rezim Internasional menunjukan sebuah negara yang memiliki kekuasaan seperti AS bisa mempengaruhi sistem negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti FATCA dengan tujuan kepentingan domestik. Hal ini dikarenakan AS juga merupakan salah satu investor terbesar yang bisa mempengaruhi perekonomian indonesia.

# Metode Penelitian

Jenis penelitian penulis gunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam hal ini adalah kepentingan Indonesia dalam penarapan FATCA, sehingga didapat analisa yang relevan atas permasalahan yang ada.

# Hasil dan Pembahasan

**Krisis Ekonomi Amerika Serikat**

Krisis AS berawal dari bangkrutnya perusahaan *dotcom* pada tahun 2001 yang bergerak dalam bidang layanan internet. Hal ini berpengaruh pada penurunan suku bunga, yang mengakibatkan maraknya pembangunan perumahan oleh warga AS. Pada 2004 Bank Central AS (*The Fed*) menaikan suku bunga sebesar 5,25% ditambah dengan adanya badai Katrina yang melanda AS pada tahun 2005 serta terdapat laporan penyalahgunaan pajak pada tahun 2006 yang dilakukan oleh warga AS. Akumulasi masalah yang terjadi di AS membuat beberpa lembaga keuangan di AS mengalami kebangkrutan.

# pertumbuhan GDP Amerika Serikat 2001 – 2010

**GDP AS**

5

4

3

2

1

GDP AS

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-1

-2

-3

Berdasarkan pada *Internal Revenue Service* (IRS), pada tahun 2010 hanya sekitar 7% dari 7 juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS. Sehingga setiap tahunnya AS kehilangan

$100 miliar dalam pendapatan pajak karena pelanggaran seperti mendirikan perusahaan di wilayah Panama dan Swiss yang mengenakan pajak rendah atau bebas pajak untuk menarik modal masuk. Hal ini menjelaskan bahwa AS kekurangan pendapatan dari proyeksi dana pajak yang dimilikinya.Kebangkrutan yang dialami lembaga keuangan di AS menyebabkan penumpukkan hutang yang sangat besar, ditambah dengan program

penurunan pajak yang menurunkan pendapatan negara, besarnya biaya untuk mendanai perang irak dan afganistan, keputusan untuk menurunkan suku bunga, kerugian dalam surat obligasi properti yang menjadi penghubung antara depresi ekonomi yang di alami AS menjadi jalan terbentuknya FATCA.



pemotong pajak 30% yang bersumber dari AS

bertindak sebagai

FFI

Pemotongan Pajak 30%



Pemilik akun AS tapi tidak memberikan pelaporan

Recalcitrant Accounts

**IRS**

FATCA merupakan kebijakan yang di buat secara sepihak oleh AS untuk memepromosikan kepatuhan pajak lintas batas dengan menerapkan standar internasional untuk pertukaran informasi otomatis terkait dengan pembayar pajak AS. FATCA dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan bagi IRS, sehubungan dengan orang-orang AS yang berinvestasi dan mendapatkan penghasilan melalui lembaga non-AS. Sementara tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi tentang arus keuangan yang berasal dari warga AS, tetapi dampak terbesarnya terdapat pada Lembaga Keuangan Asing (FFIs). Biaya ketidakpatuhan bagi lembaga keuangan yang tidak terkena pembebasan FATCA adalah pengenaan pajak pemotongan 30% atas pendapatan yang berasal dari AS.

Guna mempermudah penerapan FATCA, AS membuat *Intergovernmental Agreement* (IGA). IGA mempunyai 2 model yaitu IGA-1 dimana laporan FFI diberikan kepada instansi pemerintah lalu diberikan kepada IRS. Sedangkan IGA-2 dimana laporan FFI diberikan langsung kepada IRS tanpa membuat laporan kepada instansi pemerintah masing masing negara.

# Implemantasi FATCA



Kegiatan usaha yang dimiliki warga negara AS

NFFE



Rekening keuangan yang dipegang oleh warga negara AS, individu maupun badan usaha

Pemegang Akun AS

**Partisipasi FFI**

FFI mengidentifikasi dan melaporkan setiap tahun informasi warga negara AS berdasarkan peraturan FATCA kepada IRS

Identifikasi dan Pelaporan



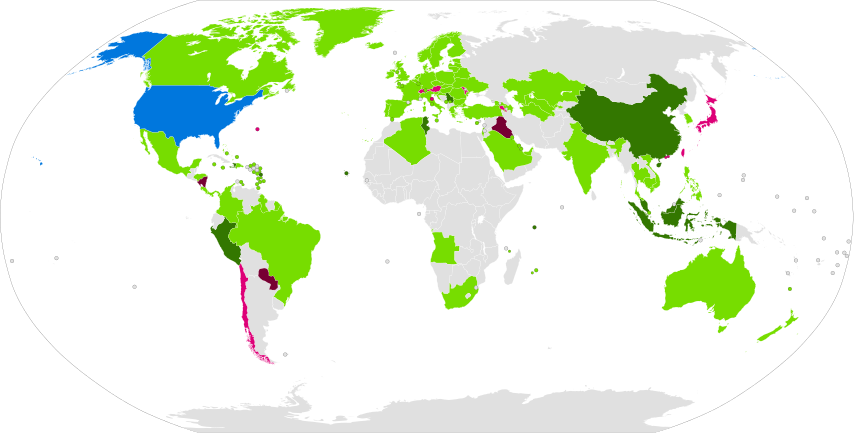
FFI yang memilih untuk tidak menandatangani Perjanjian IRS

FFI yang tidak berpartisipasi

Dengan pemberlakuan FATCA, FFI dan NFFE diharuskan untuk memberikan laporan kepada IRS tentang rekening milik warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam bentuk investasi kepada entitas tersebut. FFI yang telah menyetujui kerjasama dengan IRS harus menandatangani FATCA *Agreement*. FFI memiliki tugas yaitu: (i) mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi U.S *account holder*, (ii) FFI berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk memotong pajak atas pembayaran yang berasal dari Amerika untuk warga Amerika yang tidak mematuhi FATCA. Bagi FFI dan NFFE yang tidak memenuhi aturan FATCA, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* dengan objek pemotongan pajak antara lain pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset yang berasal dari AS*.* Adapun tahapan implementasi FATCA untuk menjelaskan secara rinci cara kerja FATCA.

Penyebarluasan FATCA terjadi di 113 negara termasuk di Indonesia. Sejak 4 Mei 2014, Indonesia setuju mengikuti FATCA dengan status sementara dengan menggunakan model IGA-1, karena masih dalam tahap penyesuaian dengan syarat yang diberikan FATCA untuk sistem yang berlaku di Indonesia, seperti menyesuaikan undang – undang kerahasiaan perbankan, keamanan data dan prasarana teknologi.

**Peta Negara Negara yang menerapkan FATCA**



*United States*

*States with a Type 1 Agreement States with a Type 2 Agreement*

*States with agreement in substance on a Type 1 Agreement States with agreement in substance on a Type 2 Agreement*

Untuk mewujudkan kesepakatan ini, pada tanggal 27-28 Agustus 2013 di Washington DC terdapat pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi *US Treasury* yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dan terdiri dari pejabat perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak) dan Bank Indonesia.

Sebagai bentuk kepatuhan serta upaya penerapan FATCA di Indonesia, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melakukan koordinasi lagi dengan pemerintah AS melalui IRS untuk pengunduran jadwal penyampaian informasi FATCA. Hal ini dikarenakan masih banyaknya hal yang harus diperbaiki. FATCA diturunkan menjadi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2015. Pasal 15 ayat 1 dimana Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan dibidang perpajakan.

Pada 2016, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan menteri

Keuangan AS guna belajar lebih lanjut terkait sistem perpajakan AS dan kelola penerapan FATCA.

Pada 2017, indonesia mengirim *draft agreement* untuk mengkaji ulang persetujuan menggunakan bahasa Indonesia untuk penerapan FATCA di Indonesia. Hingga sekarang belum terjadi kesepakatan bersama untuk penandatanganan IGA-1.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia harus membuat dan mengoperasikan sistem kepatuhan denganhambatan berupa tantangan untuk mengganti undang undang pasal 2 dalam peraturan Bank Indonesia tentang kerahasiaan Bank. Dimana pasal 2 ayat 1 dalam peraturan Bank Indonesia berisi Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan Simpanan Nasabah.

Adapun hambatan lain dalam proses penerapan FATCA, dimana Indonesia mengalami masalah, seperti dalam proses pembuatan SIPINA (sistem penyampaian pertukaran informasi keuangan), Indonesia membutuhkan biaya tambahan yang langsung (pembuat SIPINA) maupun tidak langsung (upah personil), yang harus keluar dari anggaran nasional. Kondisi ini masih ditambah dengan kebutuhan akan banyaknya personil yang ahli untuk membuat, mengatur dan melaporkan data informasi pajak warga negara AS agar setiap informasi nasabah mutakhir, lengkap dan tersedia secara elektronik. Agar pertukaran informasi dapat dilakukan secara efektif. Masalah lain yang dihadapi Indonesia dikarenakan adanya hambatan terutama dalam masalah kepatuhan, bisnis, hukum dan operasional

Untuk itu kepentingan Indonesia dalam penerapan FATCA, dapat dijelaskan melalui teori *International Regimes* oleh Stephen D. Krasner. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Krasner, pemerintah telah mempertimbangkan tindakan atau kebijakan untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam penerapan FATCA.

Adapun beberapa pertimbangan yang mempengaruhi Indonesia mengikuti FATCA, yaitu :

# Mengatasi Penghindaran Pajak di indonesia

Berangkat dari variable *Habit & Custom* dimana Kepentingan pribadi aktor- aktor dalam dunia internasional akan menghasilkan sebuah dilema dan permasalahan bersama yang membentuk kerjasama internasional. Berkaitan dengan hal ini salah satu permasalahan bersama yang dialami beberapa Negara adalah penyalahgunaan pajak. Untuk menanggulanginya AS berinisiatif menciptakan kerjasama internasional dengan Negara lain termasuk Indonesia melalui sistem FATCA.

Adapun bukti penggelapan dana pajak yang terjadi di Indonesia menurut rasio penerimaan pajak. Pada tahun 2012, penerimaan pajak di Indonesia mencapai 11,9%. Sedangkan dana yang harusnya terkumpul butuh sekitar 12,75% untuk mencukupi target belanja negara. Hal ini dikarenakan struktur pajak di Indonesia hanya didominasi oleh pemilk badan usaha daripada pajak pribadi (*individu*).

Dalam beberapa kasus lainnya penggelapan pajak internasional mencapai $7,6 triliun. ([mkri.id](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9838_20180123084322_PERKARA%20NOMOR%20102.PUU-XV.2017%2022%20JANUARI%202018.pdf)) Dimana hanya sebanyak 20% yang bisa dipantau oleh otoritas pajak dan 80% terhalang oleh peraturan kerahasiaan perbankan beberapa negara seperti contoh kasus *Panama Papers.*

Skandal *panama papers* bermula pada kebocoran data yang berupa email berantai, faktur dan dokumen berisikan 11 juta file yang bocor. Didalamnya memuat data perusahaan maupun tokoh individu yang menggunakan perusahaan lepas pantai untuk memfasilitasi suap, penggelapan pajak, penipuan keuangan dan perdagangan narkoba. [(icij.org](https://www.icij.org/investigations/panama-papers/))

Dalam dokumen Panama terdapat banyak nama pejabat yang berasal dari Indonesia seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis, Menteri BUMN Indonesia Rini Soemarno, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Nama-nama tersebut diindikasikan melakukan penghindaran pajak. Dengan data yang diungkapkan Menteri Keuangan pada tahun 2017 terdapat sekitar Rp. 146 Triliun harta warga negara indonesia yang berada di luar negeri.

Oleh karena itu kuatnya pengaruh perekonomian global kepada perekonomian Indonesia dapat mengganggu kestabilan fiskal dalam penerimaan negara sehingga hal ini juga menjadi faktor terlambatnya proses pembangunan nasional. Hal ini juga diperparah dengan masih besarnya *tax gap* atau perbedaan jumlah yang harus dibayarkan dengan jumlah yang diterima oleh negara, yakni sekitar 50%.([kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/rencana-strategis-kementerian-keuangan/))

Tax gap yang terjadi dapat dijelaskan dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak Indonesia masih dibawah target, dimana menurut data Kajian Potensi Penerimaan Berdasarkan Pendekatan Makro oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) disebutkan bahwa potensi penerimaan pajak yang dapat direalisasikan baru mencapai 70% sampai dengan 80%
2. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur *(business process*), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dan kerjasama penegakan hukum.
4. Masih terkendalanya perluasan basis pajak *(narrowed tax basis*) dalam kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil.
5. Belum optimalnya penggalian penerimaan pajak dari PPh Orang Pribadi.
6. Perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor-impor, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar di Indonesia.

oleh karena itu untuk mencapai target pemasukan pajak dan menjerat para pelaku penyalahgunaan pajak yang berasal dari Indonesia. FATCA menjadi salah satu alternative untuk jangkauan yang lebih besar. Dengan ketentuan timbal balik yang mengharuskan pertukaran informasi dari masing masing Negara**.**

# Pengaruh AS di Indonesia

Variabel berikutnya yang mempengaruhi Indonesia mengikuti FATCA adalah *Political Power* dimana kekuatan politik yang digunakan sebagai instrumen dalam memenuhi kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini adalah AS, karena AS mempunyai pengaruh atau eksistensi yang cukup kuat pada perekonomian dunia, sehingga variabel *Political Power* yang paling mempengaruhi kepentingan Indonesia dalam mengikuti FATCA.

AS sendiri merupakan negara yang dominan dalam transaksi internasional, karena Dollar Amerika (USD) masih menjadi acuan nilai tukar dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan kelompok realis bahwa negara kuat dapat menggunakan ancaman terhadap negara yang tidak bersedia mengikuti sistem yang dibuat secara mufakat maupun secara sepihak. FATCA adalah contoh bahwa negara yang kuat lebih mudah

menerapkan aturan bersama dengan standar yang mereka tentukan sendiri, baik karena ukuran ekonomi/pasar maupun oleh ancaman yang dikeluarkan.([unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id/))

Dalam kerjasama perekonomian, AS menjadi mitra dagang utama Indonesia di posisi ketiga setelah Cina dan Jepang. Nilai investasi AS ke Indonesia pada tahun 2011 mencapai USD 1,5 miliar atau 7,6% dari total investasi yang masuk ke Indonesia dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1 miliar. ([kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian_kerja_sama_bilateral_ri-as.pdf))

Menurut *Survei Doing Business* 2012 yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* (IFC), AS merupakan salah satu negara terbaik untuk melakukan usaha, sehingga berpotensi menjadi tujuan *Foreign Direct Investment* (FDI). AS menempati peringkat 13 untuk kemudahan dalam memulai bisnis. Oleh karena itu hal ini menunjukkan walaupun AS bukan penyumbang terbesar bagi Indonesia, namun AS juga punya kontribusi besar dalam membangun perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya adalah PT. *Freeport* Indonesia yang masih menjadi penyumbang dana terbesar untuk pembangunan Indonesia. Adapula *Chevron*, *Exxon* Mobil dan *Conocophillips* yang menghasilkan $4,7 miliar pada tahun 2014.(apindo.or.id)

Dengan pengalaman kerjasama yang menguntungkan serta kelebihan AS dalam kekuatan politik dan ekonomi membuat AS dengan mudah mejalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara negara lainnya. Hal ini juga membuat AS mampu menciptakan rezim keterbukaan pajak dengan ancaman denda 30% untuk semua pendapatan yang berasal dari AS. oleh karena itu untuk tetap menjalin kerjasama dengan AS tanpa dikenakan denda, para mitra AS setuju untuk mengikuti FATCA. Dengan luasnya jaringan AS, membuat sanksi yang sama juga diterapkan di negara negara yang menjadi mitra Indonesia. Dan untuk menghindari pengeluaran biaya yang tidak dapat terdeteksi, seperti risiko penalti (bunga kredit) dan denda 30% untuk semua kegiatan keuangan yang behubungan dengan AS menjadi relatif lebih mahal karna asas ketidak percayaan. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan Indonesia untuk mengikuti FATCA.

Untuk menarik kepercayaan mitranya dalam megikuti FATCA, AS menawarkan jaminan yaitu Kerahasiaan Bank hanya digunakan untuk kepentingan pajak dengan persyaratan privasi tetap dijaga kerahasiaannya dan *confidentiality* tetap dijaga dengan cara tidak boleh disebarluaskan, dibocorkan, dan terdapat sanksi pidana untuk pihak yang membocorkan data informasi keuangan yang berasal dari pertukaran informasi yang terjalin.

# Strategi dan Manfaat yang diterima Indonesia dalam penerapan FATCA

Variabel ketiga yang mempengaruhi Indonesi dalam penerapan FATCA adalah *Norms & Principles* karakteristik dari suatu rezim dimana nilai yang dipercaya dan diyakini dianggap harapan untuk menghasilkan kepatuhan dan bertanggung jawab dalam pembayaran pajak sesuai kesepakatan Indonesia yang mengikuti FATCA dengan tujuan kepentingan domestik yang melahirkan hak dan kewajiban.

FATCA menjadi tantangan bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Karena untuk mengawasi pajak pemerintah butuh akses keuangan di negara sendiri maupun negara lain. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses informasi keuangan bagi pemerintah Indonesia sendiri karena Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Dimana pemerintah hanya berperan sebagai pembina dan pengawas kegiatan perpajakan serta banyaknya kontroversi yang hadir karena tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan juga secara langsung mempengaruhi layanan perbankan lokal sehingga membuat Indonesia mempertimbangkan keputusan untuk mengikuti FATCA secara penuh. Namun hal ini juga merupakan salah satu keuntungan bagi pemerintah untuk

mengontrol atau mengamankan penerimaan negara.

Untuk itu guna mencegah penyalahgunaan pajak dan menghindari *30% withholding tax*, Indonesia berupaya mengikuti FATCA dengan status *Agreement in Subtence* atau dengan status sementara. Selain itu kementerian keuangan juga berusaha memperbaiki pelayanan, baik melalui perbaikan sistem administrasi maupun meningkatkan KPP (kantor pelayanan pajak). Hal ini terbukti dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2012 tentang pemberian dan penghimpunan data maupun informasi yang berkaitan dengan pajak , yang mewajibkan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada kementerian keuangan. ([kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/rencana-strategis-kementerian-keuangan/))

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memberikan terobosan guna menanggulangi krisis global dengan cara meningkatkan perekonomian nasional dan memacu pertumbuhan investasi asing. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti kurangnya lapangan kerja dan meningkatnya angka kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah butuh pemasukan dana. Untuk itu arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan *tax ratio*, terjaganya rasio utang pemerintah dan terjaganya defisit anggaran merupakan tujuan utama indonesia.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal di Intonsesia, antara lain:

* 1. Meng-optimalisasikan penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha (perusahaan dan individu)
  2. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas wajar (bisa diatur)
  3. Mengendalikan deficit anggaran dalam batas aman.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 8 mei 2017, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan banyak pertimbangan. Hal ini memudahkan akses informasi untuk pelaksanaan FATCA. Dimana perbank-an yang ada di Indonesia pun sudah menyediakan formulir data FATCA untuk perorangan maupun rekening bisnis guna mendukung implementasi FATCA di Indonesia.

Strategi yang mendasar dalam menjaga kesinambungan fiskal perlu memperhatikan dan mencermati kondisi perekonomian global, perekonomian dan kerjasama kawasan (regional), dan kondisi perekonomian domestik serta stabilitas sektor keuangan. Kondisi-kondisi tersebut saling terkait dalam penyusunan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.

Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata sekitar 6% sampai dengan 8% per tahun. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif serta tetap menjaga kestabilan ekonomi. Manfaat lain yang diterima Indonesia adalah untuk menjalankan semua fungsi dan strategi untuk meningkatkan keuntungan domestik dalam bidang perpajakan, seperti berikut.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka penerimaan pajak yang optimal adalah:

* + 1. Penguatan SDM dan kelembagaan, termasuk peningkatan jumlah SDM menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya;
    2. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi;
    3. Peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan;
    4. Dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (*tax compliance*);
    5. Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan pihak-pihak eksternal terkait seperti Bareskrim Polri dan KPK
    6. Penyempurnaan peraturan perundang - undangan perpajakan;
    7. Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan;
    8. Pembenahan sistem administrasi perpajakan
    9. Penyediaan layanan yang mudah, murah, cepat, dan akurat;
    10. Peningkatan efekti!tas penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.

Adapun beberapa pencapaian Indonesia dalam penerapan FATCA guna mempermudah kegiatan perekonomian antar negara dan mewujudkan kebijakan pemerintah dalam negeri. Pada tahun 2015 pasca mengikuti FATCA, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp. 545,

4 triliun yang naik sekitar 17,8% dibandingkan tahun lalu. Serta naiknya tingkat investasi AS sebanyak 39% yang mencapai US$ 3,1 miliar

Pada tahun 2017 pasca Indonesia mengeluarkan tax amnesty guna menanggulangi penyalahgunaan pajak maupun penghindaran pajak dalam kasus faktur fiktif. Dengan hasil penerimaan sebesar 123,64 triliun.

# Kesimpulan

Banyaknya kasus penyalahgunaan pajak di Indonesia menjadi dilema yang juga dialami berbagai Negara di dunia. Hal ini menciptakan harapan bersama guna mencegah penyalahgunaan pajak dengan menjalin kerjasama internasional. Salah satunya melalui FATCA yang didirikan oleh AS.

*Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak oleh warga negara Amerika Serikat, yang berlaku sejak 2010 dan diterapkan bagi seluruh mitra ekonomi Amerika Serikat melalui IGA-1 dan IGA-2 dengan resiko 30% *withholding tax* jika tidak mematuhi FATCA dan kewajiban pertukaran informasi pajak secara transparan (*Reciprocity*). AS adalah salah satu mitra utama Indonesia dan punya kekuatan politik karena dollar masih menjadi mata uang utama transaksi internasional. Melalui FATCA, AS menjadikan Bank dan Negara di seluruh dunia sebagai penagih pajak AS.

Dari keseluruhan pemaparan Kepentingan Indonesia dalam penerapan FATCA adalah faktor–faktor yang dipertimbangkan pemerintah Indonesia dalam membuat keputusan untuk mengikuti FATCA 2014. Dipengaruhi oleh variabel variabel *Political Power, Norms & Principles,* dan *Habit & Custom.* Dimana sistem yang dibuat AS turut membentuk kepentingan Indonesia berupa hak dan kewajiban untuk mengikuti FATCA

# Daftar Pustaka

DJP[, Pajak, https://www.pajak.go.id/id/pajak,](https://www.pajak.go.id/id/pajak)

Badan Pusat Statistik, *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara*, [http://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1319/realisasi-investasi-](http://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1319/realisasi-investasi-%09penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara-font-%09class-font827171-%09sup-1-sup-font-font-class-font727171-juta-%09us-2000-2016.html) [penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara-font- class-font827171-](http://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1319/realisasi-investasi-%09penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara-font-%09class-font827171-%09sup-1-sup-font-font-class-font727171-juta-%09us-2000-2016.html) [sup-1-sup-font-font-class-font727171-juta- us-2000-2016.html](http://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1319/realisasi-investasi-%09penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara-font-%09class-font827171-%09sup-1-sup-font-font-class-font727171-juta-%09us-2000-2016.html),

FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*[), https://www.fatca.hsbc.com/](https://www.fatca.hsbc.com/)

FATCA *Information for Governments,* [*https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-governments*](https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-governments)

*Impl emen tasi FAT CA di Indonesia*, 2013 kajian pkpn bahan publikasi web

implementasi fatca di indonesia.pdf,

Indrawati, Fransiska Ari, S.H, LLM, *Mengenal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan tinjauan singkat dari aspek hukum perbankan Indonesia*, Isi\_Artikel\_191329514753.pdf,

*International Regimes*, [https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTE RN](https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTE%09RN%09ATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONA%09L%25%0929.pdf) [ATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONA L% 29.pdf](https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTE%09RN%09ATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONA%09L%25%0929.pdf)

Investasi di Amerika menurun sejak 2014, investasi-amerika-di-indonesia- menurun-sejak-2013.pdf,

*International Regimes*,

[https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL](https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf)

[%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf](https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf)

Investasi di Amerika menurun sejak 2014, investasi-amerika-di-indonesia- menurun- sejak-2013.pdf,

Kajian\_kerja\_sama\_bilateral\_ri\_as.pdf,

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Industri Perbankan (Triwulan 1)*, lpip\_tw\_i\_2015\_1435155133.pdf,

OJK Keluarkan Aturan Dukung Implementasi Automatic Exchange of Information [(AEOI), https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-%09kegiatan/siaran-%09pers/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Dukung-%09Automatic-Exchange-of-Tax-%09Information-(AEOI).aspx)

[pers/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Dukung- Automatic-Exchange-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-%09kegiatan/siaran-%09pers/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Dukung-%09Automatic-Exchange-of-Tax-%09Information-(AEOI).aspx) [of-Tax- Information-(AEOI).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-%09kegiatan/siaran-%09pers/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Dukung-%09Automatic-Exchange-of-Tax-%09Information-(AEOI).aspx),

Peraturan Bank Indonesia, pbi-2-19-2000.pdf Peraturan Pemerintah, Perpu No 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/28TAHUN2015PERPRES.PDF>

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019, rencana-strategis- kementerian-keuangan-2015-2019.pdf

Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017,

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\_sidang\_9872\_PE](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9872_PERKARA%20NOMOR%20102.PUUXV.2017%20tgl.%2019%20Februari%20%202018.pdf) [RKARA%20NOMOR%20102.PUUXV.2017%20tgl.%2019%20Februari%20%](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9872_PERKARA%20NOMOR%20102.PUUXV.2017%20tgl.%2019%20Februari%20%202018.pdf) [202018.pdf,](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9872_PERKARA%20NOMOR%20102.PUUXV.2017%20tgl.%2019%20Februari%20%202018.pdf)

*The Balance. US GDP by Year Compared to Recessions and Events*. <https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543>

The Panama Papers: An Introduction, htpps://panamapapers.icij.org/video/,

U.S. Department of The Treasury, *Foreign Account Tax Compliance Act*, <http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx>

*US GDP by Year Compared to Recessions and Events,* [*https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543*](https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543)

Wibisono, Belita Ayu Silviana, Skripsi “Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia – Korea Selatan dalam Kerjasama *Working Level Task Force Meeting (WLTFM),* (Samarinda:UNMUL, 2017)

Yanuar, Ikbar, 2007, *Ekonomi Politik Internasional* 2: Implementasi Konsep dan Teori, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandug

455